

KINERJA PEMERINTAH KOTA DALAM MENGATASI PERSAMPAHAN DI MAKASSAR

Kamaruddin*

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence in dealing with waste in the city of Makassar, this study used phenomenological approach and classified as qualitative research. The results showed that the waste problem is still on the agenda of homework that has not been able to overcome the maximum to date, this gives an indication that there is no synergy between the leadership of stakeholders, employees and the community in order to jointly tackle the waste problem, so the government needs to involve the community as a subject development in addressing the waste problem in the city of Makassar.

Keywords : *community, garbage, government, policy*

PENDAHULUAN

Pelayanan pengangkutan sampah sebagai bagian dari pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun, jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar masih kurang berdasarkan data yang peneliti dapat jumlah armada pengangkut sampah 81 truk (usia diatas 20 tahun) 28 truk (usia diatas 10 tahun) 42 truk (usia dibawah 5 tahun (Sumber : Perlengkapan/Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar)

Dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar memang tidak memadai karena jumlah kendaraan pengangkut sampah masih kurang ditambah banyak yang sudah tua dan sering rusak menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Makassar belum berjalan maksimal sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat dikatakan belum efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan armada pengangkut sampah sekitar 50 unit untuk melayani pengangkutan sampah di Kota Makassar agar lebih maksimal dan telah diusahakan penambahan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebanyak 13 unit pada tahun 2012 armada pengangkut sampah (Sumber :Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar)

*) Dosen UIN Alauddin Makassar

Dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan saat ini secara langsung juga mempengaruhi pembiayaan operasional persampahan. Biaya operasional untuk menunjang pengelolaan sampah diperoleh dari subsidi pemerintah dan pendapatan asli daerah yaitu retribusi sampah.

Terkait biaya operasional untuk menunjang pengelolaan persampahan di Kota Makassar selalu mengalami defisit anggaran setiap tahunnya, pada tahun 2012 target penerimaan sebesar Rp 5.596.163.000 hanya terealisasi sebesar Rp 3.804.416.400,00 atau sebesar 67,98 % (**Sumber : Laporan Akuntabilitas kinerja Dinas 2012**) sehingga dengan kondisi tersebut berpengaruh pada sejumlah pembiayaan dalam pengelolaan persampahan.

Pemerintah Kota Makassar dengan berbagai kekurangan dan tantangan serta hambatan yang dialami dalam penanganan masalah sampah juga telah menyadari sepenuhnya hal ini, namun untuk menerapkan paradigma baru pengelolaan masih terasa sulit dilaksanakan oleh karena masih terbatasnya pemahaman berbagai komunitas masyarakat kota mengenai sampah sebagai sumber daya dan ancamannya di masa mendatang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dinas kebersihan dan pertamanan Kota Makassar memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat dan pemerintah. Dukungan masyarakat dapat berupa ikut serta dalam penanganan persampahan yang merupakan produksi dari rumah tangga masyarakat yang bersangkutan, pemeliharaan pertamanan di depan rumahnya atau di sekelilingnya dan juga berupa pembayaran retribusi yang lebih tinggi, sedangkan dukungan pemerintah daerah dapat berupa peningkatan dana operasional yang lebih memadai sehingga kebutuhan-kebutuhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tercukupi dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya yakni melayani 14 kecamatan dengan luas 175,77 Km² Dinas Kebersihan dan Pertamanan didukung dengan total keseluruhan pengangkut sampah 372 orang, total tukang sapu berstatus PNS 33 orang dan berstatus kontrak 29 orang, bagian pemeliharaan peralatan dan alat berat 13 PNS dan 10 tenaga kontrak totalnya 23 orang. Bagian monitoring dan evaluasi pengangkutan kebersihan 2 orang, jumlah sopir pengangkut sampah 73 orang PNS dan 48 tenaga kontrak, jumlah pengawas pengangkutan sampah 14 kecamatan 11 PNS dan 2 tenaga kontrak, idealnya setiap kecamatan minimal 3 pengawas, jumlah pengelola TPA 17 orang dan idealnya 22 orang. Jumlah pekerja sampah ditambah sopir dan pengawas 460 orang. Total unit kendaraan

truk sampah 151 unit, idealnya tambahan 50 truk baru, jumlah kontainer 200 unit, idealnya setiap kelurahan 2 kontainer. Berarti jumlah container yang dibutuhkan di Kota Makassar sebanyak 288 container.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah faktor determinan yang mempengaruhi pengelolaan persampahan pada dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di Kota Makassar. Jenis penelitian deskriptif kualitatif Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi*. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Sumber data primer dan Sumber data sekunder.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah faktor determinan yang mempengaruhi pengelolaan persampahan pada dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar.

Instrument penelitian ini merupakan peneliti sendiri, Teknik Pengumpulan Teknik interview, Observasi. Dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Determinan yang Mempengaruhi Pengelolaan Persampahan pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

1. Diskriminasi

Untuk menjadikan pengelolaan persampahan lebih efektif, pendekatan secara humanistic perlu terbangun secara harmonis, adanya spesialisasi pekerjaan yang dilaksanakan memang penting, tetapi hal yang keliru jika menganggap pekerjaan yang digeluti lebih penting tanpa melihat sinergitas antara pekerjaan satu dengan yang lain merupakan hal yang sangat disayangkan. Dari hasil observasi peneliti menemukan secara umum pekerja hanya lebih akrab pada sesama bidang masing - masing, begitu pula dengan bidang operasional pengelolah sampah di lapangan nampaknya mereka lebih dominan akrab dengan sesama satu bidang pekerjaa. Di sinilah peran pimpinan dalam membangun kebersamaan dalam payung organisasi sangat diharapkan, mediana dapat melalui dialog terbuka, kegiatan olahraga bersama dan sejumlah kegiatan non formal yang dilaksanakan dengan melibatkan jajaran kepala bidang, kepala seksi, pegawai dll, sehingga komunikasi yang efektif akan mudah dibangun. Hal ini akan lebih efektif apabila seluruh stakeholder baik dari pemerintah Kota Makassar maupun stakeholder dalam tubuh dinas tersebut, efektivitas dari kegiatan tersebut akan terjalin efektif apabila program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Pengharapan

Salah satu teori motivasi yang sangat populer ialah teori harapan yang dikemukakan oleh Victor Vroom, seorang ahli psikologi dari Universitas Yale, teori ini menekankan bahwa kekuatan kecenderungan berperilaku tertentu tergantung pada kuatnya harapan bahwa perilaku tersebut akan diikuti oleh keluaran tertentu dan oleh kuatnya daya tarik dari keluaran itu bagi orang yang bersangkutan, dalam penerapannya, makna teori itu ialah bahwa seorang pegawai akan bersedia melakukan upaya yang lebih besar apabila diyakini bahwa upaya tersebut akan berakibat pada penilaian kinerja yang baik, dan penilaian kinerja yang baik akan berakibat pada imbalan yang lebih besar dari organisasi seperti bonus, kenaikan gaji dan promosi, dan semuanya memungkinkan pegawai dapat mencapai tujuan yang diidam - idamkan.

Pekerja operasional pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar merupakan hal yang paling utama karena merekalah yang bersentuhan langsung dalam penanganan sampah sehari-harinya, oleh sebab itu perilaku para pekerja sangat mempengaruhi kelancaran atau rintangan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Pekerja juga merupakan hal utama dalam meningkatkan efektivitas dalam kegiatan tersebut.

Karakteristik pekerja yang berpengaruh disini ialah perilaku para pekerja dalam menjalankan kegiatan pengumpulan dan mengangkut sampah-sampah serta faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat para pekerja.

Semua pekerja dalam tubuh Dinas Pertamanan dan Kebersihan tentu dalam setiap aktivitas pekerjaan selaku pegawai baik itu pegawai organik atau non organik tentunya memiliki pengharapan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Begitu pula pegawai yang berhubungan langsung dengan proses pengangkutan sampah, sudah hal yang lumrah jikalau mereka menginginkan hidup layak, punya tanah, kendaraan dan jaminan hari tua. Meskipun mereka sudah mendapatkan tambahan pendapatan dari memulung sampah, tetapi pemerintah tetap harus memikirkan tingkat kesejahteraan yang optimal agar mereka dapat hidup dengan standar kehidupan layak sama seperti pegawai organik (pegawai negeri).

Belum adanya kriteria dan penilain yang jelas katakanlah pegawai kontrak yang telah bekerja selama sekian belas tahun apabila tidak diangkat menjadi pegawai negeri dan dinyatakan diberhentikan mendapat pesangon.

Tidak adanya jaminan dan minimnya pendapatan membuat sejumlah pegawai cenderung mencari pekerjaan sampingan dengan memberikan pelayanan pengangkutan sampah secara ekstra kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dan mempunyai dana tambahan tip buat mereka, hal inilah membuat sebagian ruas jalan terlambat mendapat pelayanan pengangkutan sampah.

Bukanlah hal yang mulut - mulut bila pekerja mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan, hal ini dipicu oleh harga yang melambung dipasaran, apa yang peneliti kemukakan sejalan dengan apa yang dikemukakan Maslow yakni kebutuhan manusia memiliki lima tingkatan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisiologis (kebutuhan primer)
- b. Kebutuhan akan rasa aman
- c. Kebutuhan sosial
- d. Kebutuhan harga diri
- e. Kebutuhan aktualisasi diri

Pada level pegawai operasional kebutuhan primer dan rasa aman sangat penting, berbagai perilaku pekerja yang mencari pekerjaan sampingan yang berupa memulung sampah, menerima job sampingan dari masyarakat yang bersedia membayar pada jumlah tertentu adalah bentuk perilaku bertahan hidup karena menganggap imbalan yang diterima dari pemerintah Kota Makassar belum dirasa cukup.

3. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan, workshop bagi karyawan dapat meningkatkan pengetahuan lebih lagi di luar perusahaan. Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: "Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh", sedangkan latihan didefinisikan sebagai berikut: "Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu".

Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: "Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum". Sedangkan definisi latihan diungkapkan oleh Andrew F. Sikula yaitu "latihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu".

Untuk level pegawai yang membutuhkan konsentrasi pemikiran yang biasanya level pegawai administratif, pemikir seperti kepala bidang ataukah kepala seksi pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan memberikan kesempatan

seluas luasnya melanjutkan pendidikan setinggi tingginya. Dalam hal pendidikan diberikan kesempatan kepada seluruh pegawai baik yang honorer maupun non honorer untuk menambah pendidikan sehingga kualitas pelayanan akan mampu ditingkatkan bila mengacu pada apa yang dikemukakan Andrew F. Sikula bahwa pihak pegawai dan decision maker perlu mendapatkan pengembangan. Hal ini penting untuk diterapkan, mengingat kondisi riil dilapangan dalam hal ini bagaimana upaya menekan volume sampah - sampah yang semakin hari semakin menumpuk serta membangun kesadaran masyarakat dalam hal persampahan dibutuhkan kemampuan dengan berbasis keilmuan yang terintegratif. Persoalan sampah tidak cukup menambah armada, karna persoalan ini juga melibatkan budaya, kedisiplinan, tanggung jawab, ilmu pengetahuan, bagi kalangan level pekerja memang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tetapi untuk level manajemen perlu orang-orang yang cerdas dalam merumuskan kebijakan dan mengatur sejumlah sumber daya dalam operasional lembaga, kegagalan organisasi bukan terletak pada level pekerja operasional melainkan pada level penentu kebijakan.

Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan ada 2 bidang yang bertanggung jawab langsung pada pengelolaan persampahan yakni Bidang Penataan Kebersihan dan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan. Baru ada 3 orang yang menyandang magister (S2) selebihnya masih menyandang gelar sarjana (S1), untuk itu pihak pemerintah Kota Makassar perlu menata agar orang-orang yang terlibat dalam Dinas Pertamanan dan Kebersihan lebih didominasi pegawai yang berpendidikan S3 (untuk kepala bidang) dan S2 (untuk kepala seksi) sedangkan untuk level pekerja lapangan yang bersentuhan langsung dengan sampah memang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tetapi keterampilan untuk mendapat pelatihan - pelatihan menjaga hidup sehat terhindar dari kontaminasi penyakit.

Dalam wawancara dan observasi di lapangan terungkap bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki para pekerja sampah umumnya tamatan SD, SMP dan memang hal ini sesuai dengan bincang-bincang kami dengan informan Ridwan bahwa untuk mengangkut sampah tidak dibutuhkan orang berpendidikan tinggi.

Akibat dari tingkat pendidikan yang dominan tamatan SD, dan SMP berpengaruh pada sikap, gaya, penampilan dan perilaku pekerja juga dalam pandangan dalam bekerja. Umumnya pekerja sampah tidak menggunakan sejumlah kelengkapan kerja yang berupa masker, kos tangan, hal ini dianggap oleh pekerja dianggap menghambat, padahal hal tersebut demikian penting untuk meminimalkan risiko pekerjaan. Para pekerja seolah-olah tidak memperdulikan hal tersebut, hal yang mereka butuhkan dalam wawancara terungkap bahwa peningkatan kesejahteraan dalam bentuk kenaikan gaji, kenaikan tunjangan operasional dan perhatian bila mereka sakit adalah hal essential bagi para pekerja. Untuk itu, untuk tataran pekerja konsep pengembangan yang dipahami adalah konsep kenaikan taraf kesejahteraan.

4. Komunikasi

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris "*communication*"), secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa latin "*communicates*", dan perkataan ini bersumber pada kata *communis*. Dalam kata *communis* ini memiliki makna 'berbagi' atau 'menjadi milik bersama' yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yaitu:

- a. Komunikator (siapa yang mengatakan?)
- b. Pesan (mengatakan apa?)
- c. Media (melalui saluran/ *channel*/media apa?)
- d. Komunikan (kepada siapa?)
- e. Efek (dengan dampak/efek apa?)

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (*encode*) pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu.

Dalam hal komunikasi pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan juga perlu membangun komunikasi yang efektif kepada masyarakat, karena telah dipahami bersama bahwa sumber sampah selain dari alam yang menyediakan juga merupakan hasil sisa - sisa kebutuhan masyarakat.

Sampah bersumber dari masyarakat sudah pasti kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya perlu diperhatikan, hal ini juga perlu didukung dalam bentuk komunikasi yang efektif dalam bentuk sosialisasi dari dinas secara terus - menerus kepada masyarakat. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward(1998: 16) mengenai komunikasi manusia yaitu:

Human communications is the process through which individuals—in relationships, group, organizations and societies—respond to and create messages to adapt to the environment and one another.

Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Adaptasi dengan melihat kondisi riil dilapangan diharapkan dalam penerapan komunikasi meminimalkan miss understanding sehingga pengenalan watak/karakter/budaya lebih awal akan menghasilkan komunikasi yang efektif.

Komunikasi dalam bentuk sosialisasi kerja merupakan agenda rutin setiap tahunnya, dan akan tetap dijalankan setiap tahun, meskipun diakui keberhasilannya belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. Luasnya area Kota Makassar, dan kompleksnya permasalahan masyarakat sehingga hal hal kebersihan tidak lagi melekat dalam diri individu, padahal sekalipun mereka

membayar retribusi sampah, mereka juga tetap harus menjaga hidup bersih. Oleh karenanya persoalan sampah perlu komunikasi yang dibangun melalui keterlibatan segenap stakeholder. Sejalan dengan hal tersebut untuk menraih hasil yang diinginkan, maka menurut Effendy (1994: 10) bahwa para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya *The Structure and Function of Communication in Society*. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*.

Berdasarkan hasil observasi peneliti belum terlihat terbangunnya komunikasi yang efektif antara pemerintah melalui SKPD Dinas dengan tokoh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya aktivitas kerja bakti yang melibatkan pemerintah setempat dengan warga. Bukti konkritnya adalah banyaknya sampah yang terlihat disejumlah ruas jalan, lorong, gang sempit pada perumahan padat penduduk di Kota Makassar. Untuk menjadikan program pengeolaan kebersihan efektif, maka Dinas Pertamanan dan Kebersihan perlu membangun/mempetakan komunikasi yaitu:

1. Komunikasi Internal Kelembagaan

Untuk menghasilkan output yang baik proses pengodokan internal yang menjadi misi visi organisasi harus jelas, transparan dan mampu dilaksanakan. Secara internal lembaga yakni pegawai operasional lapangan dan pegawai administratif belum terjalin harmonis, saling mengklaim keberhasilan dalam program yang dilaksanakan dan menyalahkan bidang lain, pada Bidang Penataan Kebersihan Kota dan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan nampak jelas gap (jurang pemisah).

Dari hasil wawancara dengan sejumlah pegawai nampak belum terbangun hubungan yang akrab baik secara formal maupun non formal, walaupun kedua bidang tersebut satu SKPD untuk Bidang Penataan Kebersihan memiliki kantor tersendiri yakni di Jalan Kerung - Kerung (Abu Bakar Lambogo), sedangkan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota berlokasi di Jl Urip Sumoharjo bersama dengan Bidang Penghijauan dan Bidang Pertamanan. Akibat daripada itu komunikasi yang terjalin pada tingkat administratif tidak berjalan efektif, hal ini nampak dari hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Komunikasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan dengan Masyarakat

Dinas pertamanan dan Kebersihan selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan persampahan seyogyanya membangun hubungan yang intens kepada masyarakat dalam hal menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah dan asri. Hal yang telah dipahami bahwa persoalan sampah bukan mutlak menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Kebersihan, melainkan juga merupakan tanggung jawab segenap elemen masyarakat dan juga keterliban pihak swasta sangat dibutuhkan dalam menjadikan sampah sebagai barang yang

dapat didaur ulang. Rendahnya partisipasi kalangan swasta untuk mendaur ulang sampah, sedikit banyak dipengaruhi oleh keahlian yang dimiliki, ada kalangan masyarakat yang mampu mengolah sampah menjadi kebutuhan seperti sandal, ada juga yang mampu menciptakan produk tas, perhiasan dan lain lain, keterlibatan home industri dipengaruhi oleh skill dan paksaan pasar dari produk tersebut.

Untuk itu pihak Pemkot melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan belum memperlihatkan kinerja dengan hasil yang optimal dalam hal membangun komunikasi yang efektif kepada pihak - pihak home industri swasta. Untuk membangun kemitraan dalam hal mengurangi volume sampah, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti opsi yang peneliti tawarkan adalah Pemerintah Kota Makassar perlu membentuk unit khusus pengolahan sampah menjadi barang jadi pada setiap kelurahan di Kota Makassar. Dengan hadirnya unit - unit pengolahan sampah pada setiap kelurahan akan berdampak pada pengurangan volume sampah di Kota Makassar. Kehadiran Bank Sampah di Kota Makassar belum efektif mengatasi persoalan sampah, karena secara umum Bank Sampah umumnya bertindak sebagai pengumpul untuk diteruskan kepada pihak swasta (Home industri swasta).

Baik Bank Sampah maupun penyediaan unit khusus pengolahan sampah menjadi barang jadi pada setiap kelurahan membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas dan hal ini dapat dilakukan melalui mobilasi yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, RT, RW dan kalangan pendidik. Untuk itu melalui komunikasi secara intens kesadaran masyarakat akan mampu tergugah. Kemudian dari hasil observasi peneliti dari sejumlah pasar di Makassar khususnya pasar tradisional dan rumah makan tradisional nampak tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan walaupun banyak juga pengunjung yang tidak mau peduli atau cuek dengan kondisi tersebut. Hal ini sebagai suatu indikasi bahwa masyarakat belum menyadari arti pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih, terkadang kita jumpai para pedagang di pasar membiarkan sampah bertebaran di depan toko mereka dengan alasan sibuk melayani pembeli, sedangkan pedagang kaki lima tidak jarang membuang sisa - sisa makanan bahkan dibiarkan menumpuk dan membusuk di sekitar tempat berjualan. Dampaknya tumpukan sampah tidak hanya merusak pemandangan masyarakat, tetapi juga berdampak pada image buruk pandangan para wisatawan lokal dan wisatawan asing.

Adapun perilaku masyarakat yang membuang sampah dipagi hari pada sejumlah sudut jalan yang dilalui oleh mobil pengangkut sampah masih terbilang sembrono, sampah yang dipacking dalam kantong plastik umumnya terbuka sehingga aroma sampah mengganggu warga yang kebetulan berdomisili dekat wilayah tersebut. Belum lagi pemandangan sampah yang terbongkar (berantakan) lantaran digerogoti oleh kalangan hewan liar. Untuk itu peran sosialisasi dan komunikasi yang efektif yang melibatkan masyarakat setempat

sangat dibutuhkan, masyarakat perlu diajak dan dibimbing untuk menata kondisi agar menjadi lebih baik. Hanya ada satu cara yakni mengubah pola berpikir masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang efektif sehingga lambat laun menjadi suatu budaya yakni malu bila kotor.

Bila mengacu pada kondisi realitas di lapangan yang ada, kesadaran warga Kota Makassar yang terbilang rendah menurut hasil wawancara dengan sejumlah pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan tidak mutlak kesalahan masyarakat. Hal ini juga disebabkan upaya persuasif dalam hal komunikasi dengan masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Hal yang seharusnya mendapat fokus utama dinas adalah mencari solusi yang tepat dalam hal mengatasi rendahnya kesadaran dalam hal kebersihan. Bila kesadaran masyarakat dapat diperbaiki melalui serangkaian kegiatan yang sepenuhnya mendapat dukungan dari segenap pihak dan lapisan masyarakat, maka persoalan sampah tentu bukan lagi masalah crucial.

Adanya kondisi yang tidak siap dalam pengelolaan persampahan dan partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan secara makro menjadi kendala dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Makassar, akhirnya sampai tahun tahun 2013 persoalan sampah masih menjadi momok yang mengkhawatirkan sekalipun Makassar pada bulan juni 2013 meraih adipura bukan berarti masalah sampah, dari hasil survey yang peneliti lakukan penanganan sampah belum merata di Kota Makassar.

D. SIMPULAN

Kinerja pegawai dapat terbangun disebabkan dua hal yakni mampu dan memiliki motivasi. Dalam pengembangannya kinerja pegawai terbangun bukan saja disebabkan gaji dan bonus yang diterima, melainkan adanya penghargaan yang diinginkan misalnya, rasa aman dalam bekerja (kenaikan status dari honorer ke pegawai negeri), tunjangan kesehatan yang layak, bonus prestasi kerja, komunikasi yang baik. Dengan memasukkan unsur-unsur penghargaan, memasukkan manusia dimana pegawai operasional (khususnya) yang langsung bersentuhan dengan sampah mengharapkan adanya penghargaan yang tidak melarang mereka sebagai mesin kerja dan bagian dari sampah, keberadaan mereka perlu mendapatkan operasi sebagai pahlawan yang tidak semua orang dapat terlihat.

Selain hal tersebut diatas keterlibatan masyarakat sangat penting, menurut Salatung tanpa keterlibatan masyarakat mustahil persoalan sampah dapat diatasi, peran masyarakat sangat besar dalam menjadikan Makassar bebas sampah. Untuk itu pemerintah perlu menggandeng masyarakat dalam setiap program kegiatan kebersihan di Kota Makassar. Berikutnya dukungan sarana dan prasarana dalam bentuk penyediaan kontainer yang masih kurang seyogyanya setiap kelurahan memiliki minimal 2 kontainer sampah jumlah container berkisar 200 buah seyogyanya berjumlah 288 kontainer.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Akuntabilitas kinerja Dinas 2012

Makmur, Jakarta, september (2009), *"Teori Manajemen Strategik Dalam pemerintahan Dan Pembangunan"*.

Mangkunegara, Anwar Prabu (2009), *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung.

Mangkunegara, Anwar Prabu.(2006), *"Evaluasi Kinerja SDM"*. Bandung: Refika Aditama.

Mangkunegara, Bandung (2001), *"Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan"*.

Moleong, Lexy J (2000), *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyanto dan Dyah (2010), *"Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar)"*, STIE AUB Surakarta 2010.

Perda No 4 tahun 2011

Pramono (2008), *"Pelayanan Publik Sebagai Alternatif Visi Keilmuan"*, Ilmu Administrasi negara Fisip Unisri Surakarta 2008.

Purbokusumo, Yuyun (2005), *"Desentralisasi dan perbaikan pelayanan publik"* dalam Purwanto Erwi Agus, Wahyudi Kumorotomo (ed). *Birokrasi Publik* (hlm 65 - 86). Yogyakarta: Gava Media.

Rencana strategis Dinas Pertamanan dan Kebersihan tahun 2008

Ribhan (2008), *"Hubungan Karakteristik Individu Dengan Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada PT Chandra Superstore Tanjung Karang Bandar Lampung)"*, Volume 4 No. 2, Januari 2008 ISSN 1411 – 9366.

Rudianto (2005), "*Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan*", Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005.

Sugiyono (2005), "*Memahami Peneletian Kualitatif*", Bandung:Alfabeta.

Susilowati (2010), "*Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Patra Jasa Semarang*", Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 2010.

Undang-undang No 18 tahun 2008

Wahjono (2009), "*Perilaku Organisasi*", Surabaya.

Walter Alcorn dkk (2012), "*Environmental Issues and Management Strategies for*

Wibowo (200), "*Manajemen Kinerja*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirawan (2009), "*Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*", Jakarta: Salemba Empat.